

1. Latar Belakang Penelitian

Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) saat ini masih terikat kuat berdasarkan animo masyarakat, yaitu dengan memilih jurusan yang “*sedang tren*”. Hal itu membuat lulusan SMK cenderung memilih untuk mencari kerja di daerah perkotaan pada sektor formal. Akibatnya, perkembangan daerah menjadi lambat karena tenaga-tenaga terampil yang mestinya bisa diarahkan untuk membangun daerahnya justru memilih untuk bekerja di daerah lain di perkotaan. Dampak urgen dari hal itu membuat perkembangan pendidikan di provinsi (kecamatan/kabupaten) kurang relevan dengan potensi/unggulan daerahnya.

Pada pelaksanaan “*stages of the electoral*” potensi unggulan daerah tidak bertujuan untuk menciptakan *difference-holistic* menurut ragam karakteristik daerah. Pemilihan potensi unggulan daerah tersebut merupakan langkah-maju dalam mengembangkan strategi akselerasi pembangunan daerah dengan potensi wilayahnya.

SMK menjadi harapan Pemerintah dapat mengatasi pengangguran, sebab SMK merupakan suatu wadah yang dipersiapkan untuk melatih siswa agar menjadi tenaga kerja terampil sesuai bidangnya. Tetapi kenyataan yang terjadi di lapangan justru menunjukkan tidak adanya penurunan melainkan peningkatan yang sangat tajam dari tahun ketahun.

Hal ini berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi. Jumlah angkatan kerja pada Agustus 2018 sebanyak 1.790,437 ribu orang, naik 65,8 ribu orang dibanding Agustus 2017. Pada Agustus 2018, sebanyak 1.721,36 ribu penduduk bekerja dan sebanyak 69,08 ribu orang menganggur. Dibandingkan tahun sebelumnya, jumlah penduduk bekerja dan pengangguran masing-masing bertambah 63,54 ribu orang dan 2,28 ribu orang.

Jumlah pengangguran pada Agustus 2018 sebanyak 69,08 ribu orang, dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 3,86 persen, turun dibandingkan TPT Agustus 2017 sebesar 3,87 persen. Dilihat dari tingkat pendidikan pada Agustus 2018, TPT untuk pendidikan SMA Kejuruan paling tinggi diantara tingkat pendidikan lain yaitu sebesar 7,75 persen. TPT tertinggi berikutnya terdapat pada Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar 7,39 persen. Dengan kata lain, ada penawaran tenaga kerja yang tidak terserap terutama pada tingkat pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Menengah Atas (SMA).

Hal tersebut merupakan “kenyataan pahit” dan kemungkinan setiap tahunnya akan terus meningkat. Selain itu, *explosion problem* tersebut disebabkan oleh penyediaan dan pendayagunaan tenaga kerja antar daerah tidak seimbang. Jumlah angkatan kerja di suatu daerah mungkin saja lebih besar dari kesempatan kerja, sedangkan di daerah lainnya keadaan sebaliknya dapat terjadi. Keadaan tersebut dapat mengakibatkan perpindahan tenaga kerja dari suatu daerah ke daerah lain, bahkan dari suatu negara ke negara. Lulusan SMK tidak hanya dicetak sebagai tenaga yang siap bekerja melainkan mampu menciptakan lapangan kerja sendiri atau berwirausaha dengan keterampilan yang dimiliki.

Dengan seperti itu, para Lulusan SMK tidak perlu melakukan kegiatan *out area* untuk mencari pekerjaan sesuai jurusan yang mereka miliki melainkan dapat melakukan *job creation* dengan mengembangkan potensi-potensi yang ada di daerah. Mengingat banyaknya jurusan-jurusan kejuruan SMK yang tersedia di daerah memiliki tingkat *conformity-optimal* yang rendah terhadap potensi-potensi daerah yang ada. Selain itu, dampak liniernya yaitu menyebabkan banyaknya para lulusan SMK yang menganggur bahkan melanjutkan kuliah yang tidak relevan dengan kejuruan yang mereka miliki Chukwerda (2013).

Jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi yang mencapai 11 Kabupaten/Kota, masih cukup rendah tingkat kesesuaian pendidikan terhadap dunia industri. Tingkat ledakan aktif jumlah SMK yang semakin pesat, belum dapat meningkatkan keterserapan lulusan SMK tersebut. Membuka jurusan yang tidak sesuai potensi daerah sehingga menghasilkan lulusan yang tidak terserap dalam dunia kerja sehingga industri yang di daerah tersebut diisi oleh tenaga dari luar dikarenakan tidak adanya daya saing dan ketidakrelevanan keahlian yang dimiliki untuk diterima. Program Pemerintah mengenai pendidikan vokasi dan rencana penambahan jumlah SMK merupakan suatu upaya *right on target* dalam meningkatkan daya saing bangsa. Komposisi SMK sesuai dengan peta potensi unggulan wilayah akan mampu meningkatkan kasta-kualitas keterserapan tenaga kerja di Provinsi Jambi yang kemudian dapat mengembangkan perekonomian lokal kabupaten/kotanya.

Adapun tujuan dari penelitian ini penyediaan dan pengembangan kebutuhan sekolah menengah kejuruan (SMK) berbasis potensi unggulan daerah di Provinsi Jambi ini yaitu dengan Menggambarkan kondisi eksisting Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Provinsi Jambi, Mengidentifikasi potensi unggulan daerah setiap kabupaten/kota dalam pengembangan/sinkronisasi bidang keahlian di SMK, dan Meidentifikasi ragam prioritas potensi unggulan daerah setiap kabupaten/kota dalam pengembangan dan sinkronisasi bidang keahlian di SMK.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan dekriptif kualitatif dibantu dengan data kuantitatif. Penelitian ini dilakukan pada sekolah menengah kejuruan (SMK) yang ada di kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jambi. Penelitian ini dilaksanakan terhitung mulai bulan Februari – Oktober 2018. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Data Kualitatif dan Analisis Data Kuantitatif, dengan menggunakan pendekatan analisis LQ (*Location Quotient*) untuk menganalisis sektor unggulan (basis) dan bukan sektor unggulan (non basis) dari sisi kontribusi PDRB terhadap kontribusi sektor-sektor yang sama pada wilayah referensi dengan rumus.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi eksisting pendidikan menengah kejuruan di Provinsi Jambi yaitu sebaran SMK untuk masing-masing wilayah Kabupaten/Kotamadya belum merata, dimana sebagian besar (20,93%) terdapat di Kota Jambi. Hal yang sangat mengembirakan adalah tingginya partisipasi masyarakat dalam pengembangan swasta yang terlihat dengan proporsi SMK swasta dan negeri yang relatif berimbang. Dari 172 SMK yang sudah ada 75 unit (43,60 %) memiliki status SMK Swasta dan 97 unit (56,40 %) merupakan SMK Negeri. Fenomena ini menunjukkan bahwa SMK dianggap memiliki prospek besar dan diminati sehingga mendorong motivasi swasta untuk melakukan investasi dalam sektor pendidikan kejuruan. Dominasi SMK Swasta terutama di wilayah Kota Jambi dimana dari 36 SMK yang ada 31 SMK merupakan SMK Swasta. Kemudian jumlah guru sebanyak 3.906 orang, Siswa 45.826 orang dan. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa perbandingan antara rasio guru terhadap siswanya di Provinsi Jambi sebesar 11,73 persen.

Bila dilihat sebaran rasio guru dengan murid SMK Negeri dan Swasta pada kabupaten/ kota yang masih di bawah Provinsi Jambi adalah Kabupaten Kerinci, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Merangin, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kota Sungai Penuh. Ketidakterrataan distribusi guru ini kedepan hendaknya dapat menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Jambi melalui kewenangannya pada pendidikan menengah baik melalui redistribusi guru maupun *re-engineering* pada kabupaten/kota.

Pendidikan kejuruan harus memperhatikan jenis dan bidang-bidang pekerjaan yang tersedia di lapangan kerja, baik bekerja mandiri atau berwirausaha maupun bekerja pada industri. Hal inilah yang menjadi menjadikan ragam bidang keahlian SMK harus berorientasi terhadap jenis-jenis bidang pekerjaan atau keahlian yang berkembang dan dibutuhkan oleh DU/DI.

Berdasarkan sebaran SMK berdasarkan wilayah dan bidang keahlian yang ada di Provinsi Jambi yang sudah berkembang terdiri dari 9 bidang keahlian dengan sebaran pada masing-masing wilayah. Penyebaran bidang keahlian pada SMK yang sudah ada masih didominasi oleh bidang tertentu terutama bidang keahlian teknologi dan rekayasa, teknologi informasi dan komunikasi serta bisnis dan manajemen. Hal ini tidak terlepas keberadaan bidang keahlian tersebut yang telah banyak dikenal dan diminati masyarakat karena masing-masing bidang keahlian tersebut merupakan transformasi bentuk sebelumnya dari SMEA (Sekolah Menengah Ekonomi Atas) dan STM (Sekolah Teknik Menengah). Pada sisi lain perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga mendorong semakin meningkatkan SMK dengan bidang keahlian tersebut apalagi saat ini dunia memasuki era revolusi industri 4.0. Sedangkan bidang keahlian lain yaitu agribisnis dan agroteknologi merupakan reinkarnisasi SPP (Sekolah Pendidikan Pertanian). Provinsi Jambi dengan struktur ekonomi masih didominasi oleh sektor pertanian dalam arti luas ternyata hanya memiliki 11,95 persen dengan bidang keahlian agribisnis dan agroteknologi. Sementara untuk sektor pertambangan dan penggalian hanya memiliki 1,33 persen dimana sektor ini berkontribusi signifikan bagi PDRB Provinsi Jambi dan merupakan salah satu sektor unggulan setelah sektor pertanian.

Kebijakan pembangunan Provinsi Jambi difokuskan kepada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, kebijakan pembangunan Provinsi Jambi merupakan turunan dari kebijakan pembangunan Nasional dengan mempertimbangkan keunggulan daerah dan kearifan lokal masyarakat Provinsi Jambi.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jambi 2005 – 2025 juga menjadi rujukan untuk mewujudkan pembangunan daerah yang merata dan berkeadilan dengan mengurangi kesenjangan sosial ekonomi dan keberpihakan kepada daerah tertinggal dan penduduk miskin. Disamping itu, juga harus dilakukan upaya meningkatkan pelayanan sosial ekonomi dan kesetaraan gender bagi masyarakat. Untuk itu, dalam menyelenggarakan pembangunan daerah di Provinsi Jambi lebih diarahkan pada Pembangunan ekonomi daerah yang berkualitas didasarkan kepada pengembangan agribisnis dan agroindustri unggulan yang ditumbuhkembangkan sesuai potensi sumberdaya daerah yang dimiliki.

Selain itu, pembangunan di Provinsi Jambi juga diarahkan sesuai dengan potensi dan fungsi ruangnya. Oleh karena itu, sebagaimana telah diarahkan dalam RTRW Provinsi Jambi Tahun 2013 – 2033, penyelenggaraan pembangunan kewilayah di Provinsi Jambi lebih diarahkan pada : 1) Mengalokasikan penggunaan ruang di Provinsi Jambi (pola ruang) dengan menyerasikan kegiatan antar sektor dengan kebutuhan ruang dan potensi sumberdaya alam yang berasaskan kelestarian lingkungan menuju pembangunan yang berkelanjutan; 2) Pengembangan sarana prasarana yang diarahkan pada upaya pemerataan keterkaitan spasial antar kawasan (struktur ruang); 3) Mengakselerasi pertumbuhan wilayah yang potensial untuk tumbuh, menjaga pertumbuhan pada kawasan strategis dan cepat tumbuh dengan tetap memperhatikan aspek keseimbangan pertumbuhan wilayah dalam satuan ruang; dan 4) Mendorong pengembangan wilayah untuk setiap kabupaten/kota di Provinsi berdasarkan pertimbangan sektor andalan, sektor potensial/unggulan dan kendala pengembangannya yang ada.

Adapun arahan pengembangan wilayah untuk setiap kabupaten/kota di Provinsi Jambi sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi, yang didasarkan pertimbangan sektor andalan, sektor potensial/unggulan dan kendala pengembangannya yang ada maka diarahkan sebagai berikut :

1. Kabupaten Kerinci, Merangin, Sarolangun, Bungo dan Tebo mempunyai peranan dan fungsi untuk perkebunan; peternakan dan perikanan; pertanian; pariwisata; pertambangan dan kawasan konservasi.
2. Kabupaten Batanghari mempunyai peranan dan fungsi untuk perdagangan dan jasa regional; industri pengolahan; perkebunan; peternakan dan perikanan; pertanian; pariwisata; pertambangan dan kawasan konservasi.
3. Kabupaten Muara Jambi mempunyai peranan dan fungsi untuk penyangga ibukota Provinsi; perdagangan dan jasa regional; industri pengolahan; perkebunan; peternakan dan perikanan; pertanian; pariwisata; pertambangan dan perumahan skala besar
4. Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai peranan dan fungsi untuk Perdagangan dan jasa regional; Industri pengolahan ; Perkebunan; Peternakan dan perikanan; Pertanian; Pertambangan; Pelabuhan laut; Perikanan dan kelautan.

5. Kabupaten Tanjung Jabung Timur mempunyai peranan dan fungsi untuk Perdagangan dan jasa regional; Industri pengolahan ; Perkebunan; Peternakan dan perikanan; Pertanian; Pertambangan; Pelabuhan laut; Perikanan dan kelautan; dan kawasan konservasi
6. Kota Sungai Penuh mempunyai peranan dan fungsi untuk Pelayanan Pariwisata; Pendidikan; dan kawasan konservasi.
7. Kota Jambi mempunyai peranan dan fungsi untuk Pemerintahan Provinsi; Perdagangan dan jasa regional; pusat distribusi dan kolektor barang dan jasa; Industri; transportasi; pendidikan tinggi; dan perumahan skala besar.

Berdasarkan perhitungan PDRB dari tahun 2013 hingga 2016 menurut harga konstantahun 2010 bahwa pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi mencapai 4.71%. Ditinjau dari kontribusi sektoral, sampai dengan tahun 2016 sektor pertanian, kehutanan dan perikanan masih merupakan sektor dominan, dengan kontribusi terhadap PDRB mencapai lebih dari 25 persen. Dilihat dari klasifikasi sektoral, peringkat empat besar penyumbang PDRB Provinsi Jambi yaitu: Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan, dan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Kontribusi sektoral ini secara tidak langsung menggambarkan potensi daerah yang ada di masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Jambi. Empat sektor unggulan tersebut dapat dikembangkan menjadi prioritas pembangunan di Provinsi Jambi. Pemilihan ke empat kategori ini selain karena mampu menyerap tenaga kerja yang cukup signifikan juga karena kontribusinya cukup besar pada pembentukan PDRB Provinsi Jambi.

Keberagaman potensi unggulan wilayah di Provinsi Jambi sangat beragam dan luas. Potensi unggulan wilayah tersebut seperti bidang perikanan, bidang pertanian, bidang perdagangan, bidang peternakan, bidang perkebunan, bidang perindustrian, bidang pertambangan, bidang pariwisata, industri kreatif, dan sebagainya. Maka dari itu penentuan prioritas potensi unggulan sangat penting agar fokus pengembangan lebih terarah.

Spektrum Keahlian yang saat ini berlaku adalah berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Dikbud Nomor 8275/D5.3/KR/2016, Spektrum Keahlian PMK terdiri atas 9 (sembilan) Bidang Keahlian, 48 Program Keahlian, dan 142 Paket Keahlian. Spektrum Keahlian tersebut merupakan acuan bagi sekolah (SMK) untuk membuka dan mengembangkan program pendidikan.

Sekolah hanya boleh membuka atau menyelenggarakan program pendidikan sesuai dengan spektrum keahlian yang berlaku. Pada masing-masing bidang keahlian tersebut memuat program keahlian dan kompetensi keahlian. Ragam bidang keahlian tersebut harus nyata dan dikontrol sesuai dengan prioritas potensi unggulan daerah.

Aspek bidang keahlian masing-masing kabupaten/kota meskipun beberapa bidang keahlian yang sebenarnya dibutuhkan telah ada dan relatif telah sesuai dengan potensi daerahnya tetapi Kompetensi bidang keahlian tertentu perlu ditambahkan seperti kesehatan dan pekerjaan sosial, energi dan pertambangan dan seni dan industri kreatif.

4. Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan hasil penelitian dapat direkomendasikan beberapa hal yaitu Gubernur Provinsi Jambi beserta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait (Dinas Pendidikan, BAPPEDA dan Dinas Tenaga Kerja) menerjemahkan Inpres No. 9 Tahun 2016 menjadi Peraturan Daerah (Perda) tentang Revitalisasi SMK. Melalui Perda tersebut dapat dirumuskan Pola dan Program-program revitalisasi SMK di tingkat daerah.

Dalam rangka pemenuhan guru produktif dapat dilakukan melalui program keahlian ganda. Langkah-langkah yang harus ditempuh yaitu dengan menentukan *roadmap* kebutuhan guru produktif di tiap Kabupaten/Kota dan penentuan model pemenuhan kuantitas guru produktif SMK baik dalam jangka pendek, menengah maupun jangka panjang.

Dalam mengatasi kesenjangan antara kompetensi yang dibutuhkan dunia usaha dan dunia industri (DU/DI) dengan kompetensi yang diajarkan di SMK serta dalam rangka meningkatkan relevansi kompetensi keahlian guru produktif dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada pada dunia usaha dan dunia industri (DU/DI), SMK harus mengirimkan peserta didiknya melalui program praktik kerja industri (prakerin) ke DU/DI, kemudian juga memberikan kesempatan bagi guru bidang studi keahlian di SMK untuk magang di DU/DI yang relevan dengan kompetensi yang diajarkan atau mendatangkan staf ahli sebagai guru tamu dari DU/DI yang ada.

Penatan Kelembagaan SMK yang meliputi program kejuruan yang dibuka dan lokasi SMK serta pengembangan SMK unggulan sesuai dengan potensi daerah masing-masing. Setiap Kabupaten/Kota memiliki potensi sumber daya yang berbeda-beda dan keunikan karakteristik tersendiri. Oleh karena itu program keahlian pada pendidikan SMK hendaknya disesuaikan dengan potensi dan karakteristik masing-masing daerah dan diarahkan menghasilkan tenaga kerja yang lebih produktif dan mampu mendayagunakan potensi perekonomian daerah, Kesesuaian antara dunia pendidikan dan potensi unggulan daerah akan berdampak pada optimalisasi pengelolaan sumber daya yang pada gilirannya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, serapan tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran.

SMK sebagai penyedia tenaga kerja terdidik dan terampil tidak hanya harus memenuhi kebutuhan secara kuantitatif, yang perlu diperhatikan adalah jenis-jenis bidang keahlian dan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DU/DI) yang ada di daerah. Kesesuaian bidang keahlian ini hendaknya menjadi acuan bagi penyelenggaraan pendidikan di SMK.

Sinergitas dan kerjasama dengan instansi terkait, dunia usaha dan dunia industri (DU/DI). Mendorong terciptanya komitmen masing-masing *stackholder* untuk ikut berpartisipasi aktif dalam pengembangan SMK berbasis potensi daerah, dalam penentuan bidang keahlian yang akan dikembangkan, penyusunan kurikulum, sharing pembiayaan pembangunan dan kerjasama dalam penyediaan sarana dan prasana selama proses pembelajaran.